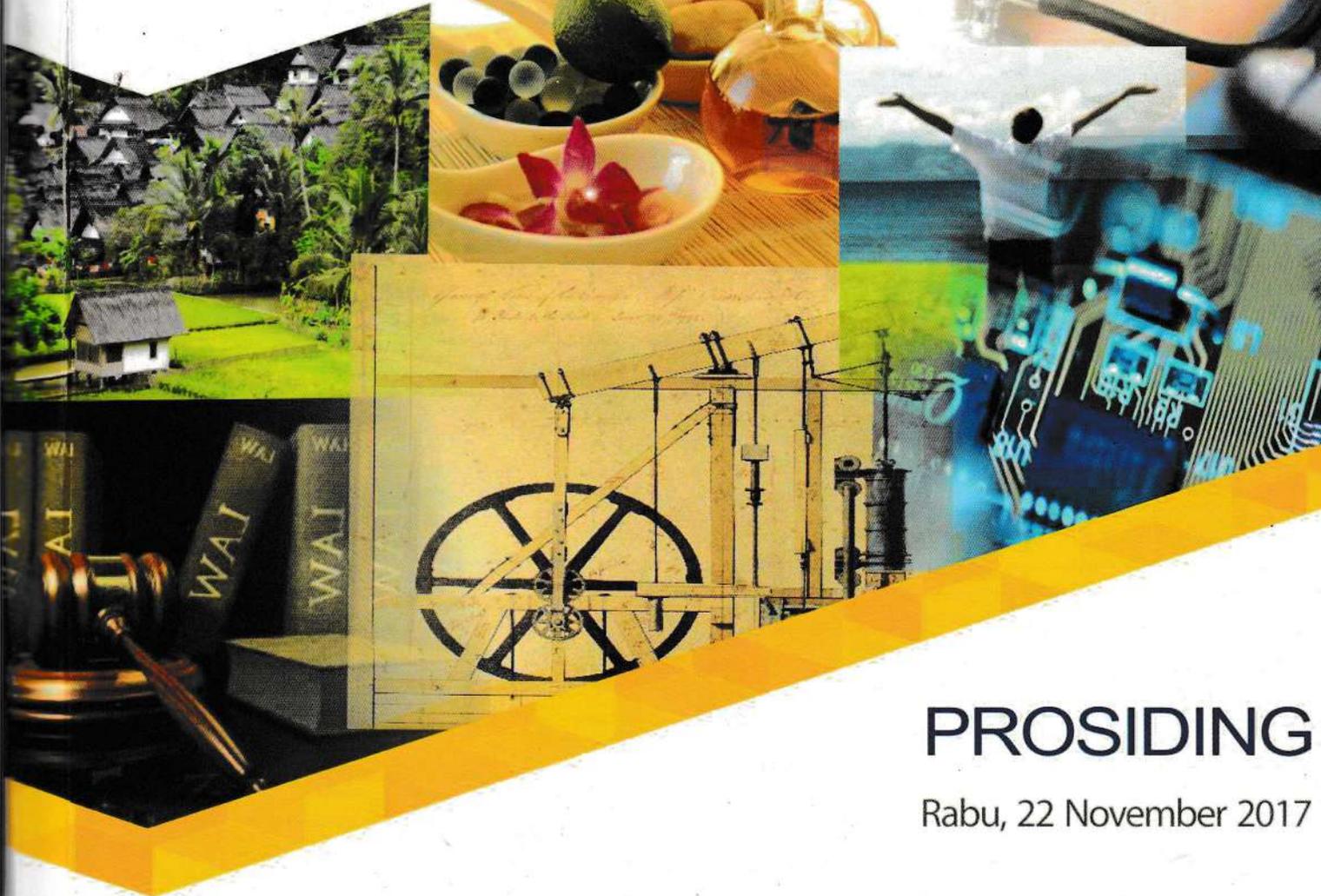




UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



PROSIDING

Rabu, 22 November 2017

SEMINAR NASIONAL Seri 7
**Menuju Masyarakat
Madani dan Lestari**

e-ISBN:978-602-450-211-9

Prosiding

Seminar Nasional Seri 7
MENUJU MASYARAKAT
MADANI DAN LESTARI

Yogyakarta, 22 November 2017

Editor: Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, S.T., M.T.
Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA.

Universitas Islam Indonesia

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL SERI 7
MENUJU MASYARAKAT MADANI DAN LESTARI**

Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi penelitian terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia dengan 7 tema sebagai berikut:

1. Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami
2. Sistem Penyelenggaraan Negara Anti Korupsi dan berbasis Keadilan
3. Pengembangan Wirausaha Industri Kreatif berbasis Syariah
4. Pengembangan Kawasan Permukiman yang Terintegrasi, Hijau dan Tanggap Bencana
5. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pendidikan dan Good Governance
6. Pengembangan Teknologi Kesehatan untuk Pencegahan, Diagnostik, dan Terapeutik
7. Pengembangan Minyak Atsiri dan Fitofarmaka untuk Peningkatan Kesehatan

Diharapkan melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Penanggungjawab : Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D

Ketua Panitia : Dr. Yulianto P. Prihatmaji, IPM., IAI.

Reviewer : Dr. Jaka Sriyana
Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D.
Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D.
Prof. Ir. Mochamad Teguh, MSCE., Ph.D.
Dr. R. Bagus Fajriya Hakim, S.Si., M.Si.
Rudy Syahputra, S.Si., M.Si., Ph.D.
Prof. Dr. Ir. Raden Chairul Saleh, M.Sc.

Pengarah : Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA., IAI.

Editor & Layout : Dr.Sahabudin Sidiq, SE., MA.
Dr. Arif Hidayat, ST., MT.
Feris Firdaus, S.Si., M.Sc.
Sumarno, S.Kom
Ronny Martin Saputra, S.Kom

ISBN : *e-ISBN: 978-602-450-211-9*
p-ISBN: 978-602-450-210-2

Alamat Redaksi : Rektorat, Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang km.14,5 Yogyakarta 55584
Telp.(0274)898444 Fax.(0274)898459

Penerbit : Universitas Islam Indonesia

Distribusi : Didistribusikan secara luas di tingkat nasional terutama instansi terkait seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian seluruh Indonesia serta pemerintah daerah dan pusat, serta dapat diunduh pada website [www. uii.ac.id](http://www.uii.ac.id)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 7 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh Universitas Islam Indonesia dalam rangka diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2020 Universitas Islam Indonesia. Diharapkan pada tahun 2017 melalui penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acara seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif banyak pihak. Oleh sebab itu Universitas Islam Indonesia mengucapkan banyak terimakasih kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Dimiyati, Direktur Utama PT Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan segenap instansi terkait lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 75 makalah. Setelah melalui proses review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah 59 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa pascasarjana, dan instansi pemerintah.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri 7 Menuju Masyarakat Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat di Indonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.

Panitia

Fotwa Tentama, Desta Rizky Kusuma

PENGARUH PERLAKUAN BAHAN DAN MASSA DAUN CENGKEH TERHADAP
RENDEMEN DAN KUALITAS MINYAK DENGAN METODE AIR DAN UAP 142

Fransisca Meyla Aryawati, Nyuwito

REKONSTRUKSI MODEL PENILAIAN KINERJA DANA PENSIUN DENGAN MODIFIED
BALDRIGE ASSESSMENT SEBAGAI UPAYA MENUJU GOOD PENSION FUND GOVERNANCE..... 156

Gagak Apriyanto, Achmad Firdiansjah

MEMBANGUN SISTIM IDEAL PENGATURAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA PRASEJAHTERA 171

Hadi Karyono, Sumartini Dewi

AKTIVITAS SITOTOKSIK DAN ANTIPROLIFERATIF SENYAWA DERIVAT XANTON
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP EKSPRESI mRNA COX-2, VEGF,
DAN VEGFR2 PADA SEL KANKER KOLEREKTAL..... 187

Isnatin Miladiyah, Emmy Yuanita, Jumina Jumina, Sofia Mubarika Haryana, Mustofa Mustofa

EVALUASI MODEL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI
SURABAYA 203

Khusnul Fikriyah, Ahmad Ajib Ridlwan

“ PERANAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI “ 214

Liza Deshaini, Evi Oktarina

KARAKTERISASI FORMULASI SNEDDS NANO KURKUMIN SEBAGAI ANTI ARTRITIS
REMATOID 226

Lutfi Chabib, Dimas Adhi Pradana, Jamalullail, Nadya Aqliyah H

PERANCANGAN SCREW SCREEN UNTUK PRODUKSI PUPUK ORGANIK DARI SAMPAH
DOMESTIK..... 237

M.S. Prasetyo Budi, Y. Agus Jayatun

PERANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN TARAF KESEHATAN PELANGGAN
AIR BERSIH DI KABUPATEN PATI..... 247

Mahmuda Pancawisma F, Endarto

“SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA ANTI KORUPSI BERBASIS KEADILAN”
BUDAYA KORUPSI DAN PUNGLI 261

Marsudi Utoyo, Tobi Haryadi

MOSQUE-BASED ZAKAH INFAQ AND SHADAQAH MANAGEMENT (A STUDY AT
GREAT MOSQUE IN SLEMAN, YOGYAKARTA) 277

Martini Dwi Pusparini

PENGEMBANGAN ALAT UKUR KOMPETENSI GURU DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN MELALUI DIFFERENTIATED INSTRUCTION DI SEKOLAH INKLUSI 294

Mira Aliza Rachmawati, Nur Widiasmara, Thobagus Muh. Nu'man

KARAKTERISTIK BATAKO-KAIT SEBAGAI ALTERNATIF DINDING PASANGAN..... 304

PERAN DAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI “

Liza Deshaini, Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
evioktarina255@gmail.com

ABSTRAK

... korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada ... padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat ... kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, ... moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung ... Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak ... terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ... terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat ... menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus dalam ... dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan ... undang-undang oleh warga negara. Tujuan penelitian adalah menumbuhkan ... kepada mahasiswa, metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian ... dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup ... dan bahan hukum sekunder. Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ... menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu ... kebijakan yang koruptif mampu menjadi watch dog (anjing penjaga) ... negara dan penegak hukum dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti ... di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, di tingkat ...

Kata Kunci: Peranan, Mahasiswa, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

... all the time, corruption is more tolerated by various sides rather than to wipe it out. ... act of corruption is a kind of criminality that can reach various interests related ... rights, nation ideology, economy, nation morality, etc. That constitutes bad ... that tends to be difficult to overcome. The overcoming difficulty of the act of corruption ... the great quantities of the act of corruption accuseds which are given verdict of free ... punishment. For the accused which is unequal to what he did. This matter is very ... the nation and abstract the national developments. If it happens continuously for long time, ... justice sense and belief upon the law and the constitutional regulation by the ... The objective of this research was to grow the attitude of anti-corruption to the ... students, the research methode used was normative research which was conducted by ... the book material or secondary data which included primer and secondary law ... The role of the university students in anti-corruption motion is able to be the agent of ... watch dog for the institution of the nation and the law upholder and the university students ... in the anti-corruption motion is in family environment, in campus environment, in ... in local/national level.

Keywords: Role, University students, Criminal Act of Corruption.

... dunia, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan ... Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ... Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang ... merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan ... masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga ... nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ... budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju ...

... korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada ... tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat ... kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, ... negara, moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku ... sulit untuk ditanggulangi.

... penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak ... terkawak kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ... yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat ... menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus ... yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas ... perundang-undangan oleh warga negara.

... memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat ... masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri ... tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan ... dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para ... di Indonesia.

... tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya ... peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang ... yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering ... *collar crime* atau kejahatan kerah putih.

... kompleksnya permasalahan korupsi di tengah- tengah krisis ... serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ... tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang ... secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan

meningkatkan dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan salah satu faktor yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak sesuai dengan demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi koruptor hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Elite penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan politik. Praktik penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat demokrasi. Membiarkan koruptor menjarah kekayaan dan aset negara berarti menjadi penghinaan negara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan politik sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas personal dan keandalan jaringan institusional. Dengan demikian, arus tersebut diharapkan secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena korupsi.

Fenomena korupsi yang sekarang telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta menurunnya pelayanan publik. Akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan (Rohim, 2008)

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang oleh pemerintah memerlukan upaya luar biasa pula untuk pemberantasannya. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar yaitu (1) penindakan dan, (2) pencegahan, tidak akan berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Pendidikan Tinggi, 2011). Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa merupakan salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan dan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran serta masyarakat adalah:

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam

mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan

telah terjadi tindak pidana korupsi ;

untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi

serta penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;

menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi ;

untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya

yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari ;

untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c ;

2. diminta hadir pada proses penyelidikan, penyidikan, dan di

sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma

agama dan norma sosial lainnya.

ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

kontribusi mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya

yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa

lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya

kejujuran di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan

yang bergerak gerakkan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif

perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan

penyebabnya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus

memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

...mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain ... sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi ... bertujuan untuk memberi pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk ... pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka ... menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan ... mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi ... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat ... (Sugandari dan Tinggi, 2013a)

...uraian dalam pendahuluan diatas, yang menjadi permasalahan ... ini adalah :

...peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi?

...keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ?

PENELITIAN

...dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka ... menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan ... bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan ... dan bahan hukum tersier.

...data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data ... melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini ... :

Bahan hukum primer

...bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan ... Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- ... Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan ... Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder

...bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan ... primer, seperti :

- Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

ABSTRAK

Peran Hukum Dalam Gerakan Anti Korupsi

Hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang adil dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram dan ketertarikan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menimbulkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya (Chaerudin, dkk, 2008). Terdapat kaitan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum akan mewujudkan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan dirasakan oleh masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum di masyarakat. Jika kondisi diatas dibiarkan maka masyarakat akan mencari sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan hukum yang ada.

Menurut Soekanto, secara konseptual inti dari arti penegakan hukum adalah kemampuan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan menegakannya, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai hukum menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan manusia. (2009)

Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdampak sangat luar biasa adalah korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi adalah salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem pemerintahan politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu penting korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata hubungan internasional.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Korupsi dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika korupsi dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama, yang harus kita perangi bersama-sama dan sungguh-

...nya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas
...nya yang luar biasa pula. Upaya pemberantasan korupsi sama sekali
... yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa
... jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja. Tetapi juga
... jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya
... korupsi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait yaitu
... dan masyarakat, Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu
... masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

... perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai
... penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang
... Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi
... NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998.
... dikirikiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di
... motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang
... .

... mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka
... intelektualitas, jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang
... muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa
... selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam
... peristiwa besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan
... sebagai agen perubahan (*agent of change*).

... konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan
... motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki,
... integritas, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.
... kompetensi yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan
... Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2013b)

- a. Mampu menjadi agen perubahan
- b. Mampu menyuarakan kepentingan rakyat
- c. Mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif
- d. Mampu menjadi *watch dog* (anjing penjaga), lembaga - lembaga negara dan
penegak hukum

Peran Masyarakat Dalam Gerakan Anti Korupsi

Gerakan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara sistematis melakukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada khususnya.

Salah satu pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk perbaikan dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam pelaksanaan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Djaja, 2008)

Undang-Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, pemeriksaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa peran serta masyarakat. Dengan demikian dalam strategi pemberantasan korupsi faktor utama, yaitu pencegahan, penindakan dan peran serta masyarakat.

Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut sebagai hukuman korupsi yang sifatnya *represif*. Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk membentuk Budaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan

... pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks ini peranan mahasiswa ... bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan.

... mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan ... wilayah yaitu :

Lingkungan keluarga

... karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat di mulai dari ... keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap ... anggota keluarga, misalnya :

... dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayah atau

... keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi ? misal tidak

... berputar di tempat dimana ada tanda larangan berbelok/berputar

... ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga

... tidak mengendarai motor berlawanan arah ?

... penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi ?

... diantara keluarga yang menggunakan produk bajakan ?

... proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali ... keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah

... terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap

... korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana

... anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar

... lalu lintas ? apakah anak berani bertanya tentang asal usul penghasilan orang

Lingkungan Kampus

... mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ... wilayah, yaitu :

... individu mahasiswanya sendiri

... mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri

... berprilaku koruptif dan tidak korupsi

... komunitas mahasiswanya

... mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya

... mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berprilaku

... dan tidak korupsi.

Sekitar

yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan.

biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat menyurat, pembuatan surat-surat dokumen tersebut? wajarkah jumlah biaya tersebut?

informasi publik kepada berbagai informasi sudah didapatkan?

pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? misalnya:

kompor gas, Bantuan Langsung Tunai, dan sebagainya

Lokal Dan Nasional

konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi

dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan

masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi

(leader) dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun

PULAN

mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah :

menjadi agen perubahan

menyuarakan kepentingan rakyat

mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif

menjadi *watch dog* (anjing penjaga) lembaga-lembaga negara dan

membaca hukum

perhatian mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah :

lingkungan keluarga

lingkungan kampus

masyarakat sekitar

lingkat lokal/nasional

TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah

Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Bapak Pembina Sekolah Tinggi Ilmu

Pemuda Palembang, Ketua dan Staff LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Sumpah dan rekan-rekan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Wahid Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika

2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

2008, *Peraturan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Direktorat Jenderal Pendidikan

2008, *Pendidikan Anti Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2008, *Peraturan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.

2008, *Operasi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.

2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta,